LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) / LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) / Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini maksudkan sebagai tolok ukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong tahun 2025 diharapkan juga membawa dampak terhadap peningkatan layanan pemerintahan dan perbaikan perekonomian masyarakat Kabupaten Tabalong, dengan pemanfaatan teknologi informasi berupa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronek (SPBE) serta data statistik sektoral

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tanjung, 12 Januari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong,

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

EDDY SURIYANI, S.Sos., MA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197412231994031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah 1
1. Dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah 1
2. Kondisi Sarana dan Prasarana 11
3. Jumlah Pegawai, Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 13
B. Perencanaan Pembangunan 15
1. Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabalong 2025-2029 15
2. Strategi dan Arah Kebijakan 17
3. Program Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 20
C. Prioritas Pembangunan 26
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH 30
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 30
B. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 41
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 43
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan 43
B. Gambaran Umum Tugas Pembantuan 43
C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 44
D. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintaan Yang Diberikan 45
Kepada Tingkatan Pemerintah Dibawahnya (Pemerintahan Desa) 45
E. Hambatan / Permasalahan dan Upaya Penyelesaian (Saran tindak Lanjut) 45
BAB IV CAPAIAN MAKRO ATAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 46
BAB V PENUTUP 80

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

A.1. Dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya menurut Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik
b. Pelaksanan kebijakan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik
d. Pelaksanan administrasi bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik
e. Pelaksanan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong adalah :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TABALONG

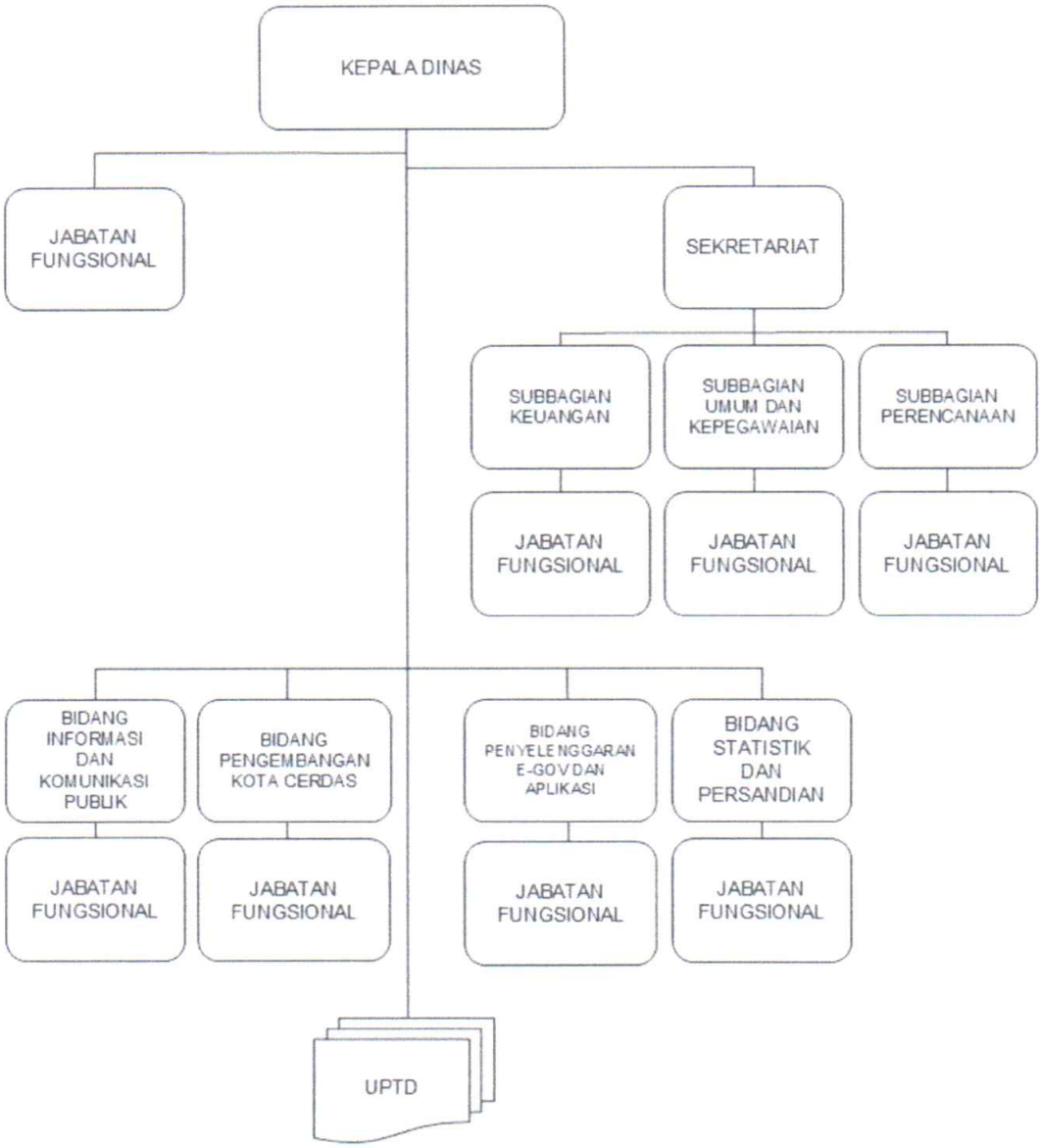

PERATURAN DAERAH 03 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 03)

Unsur – unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Unsur pembantu pimpinan dalam penjabaran program dan kegiatan administrasi adalah Sekretaris
3. Unsur pelaksana dalam penjabaran program dan kegiatan teknis adalah Kepala Bidang
4. Unsur pelaksana kegiatan sub administrasi adalah kepala sub bagian
5. Kelompok jabatan fungsional

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris membawahi :
   - Sub Bagian Perencanaan
   - Sub Bagian Keuangan
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:
   - Pranata Humas Ahli Pertama
   - Pranata Humas Ahli Muda
4. Bidang Penyelenggaraan e-Govermment dan Aplikasi terdiri dari:
   - Pranata Komputer Ahli Muda
5. Bidang Pengembangan Kota Cerdas
   - Pranata Komputer Ahli Muda
6. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri atas :
   - Pranata Humas Ahli Muda
   - Analis Kebijakan Ahli Muda
   - Analis Kebijakan Ahli Pertama
   - Statistisi Ahli Pertama
   - Pranata Komputer Ahli Pertama
7. Unit Pelaksana Teknis
6. Jabatan Fungsional
   1) Pranata Komputer Ahli Muda
   2) Pranata Humas Ahli Muda
   3) Analis Kebijakan Ahli Muda
   4) Analis Kebijakan Ahli Pertama
   5) Statistisi Ahli Pertama
   6) Pranata Komputer Ahli Pertama

Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong, sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

   Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyelenggarakan perencanaan dan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian.

2. **Sekretaris**

   Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi

   a) Mengkoordinasikan, membina, merancang, melaksanakan dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat teknis dan administratif intern sekretariat Dinas
   b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat administratif lingkup Dinas dan instansi terkait.

3. Bidang Informasi dan komunikasi Publik

   a) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
   b) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Informasi dan Komunikasi Publik
   c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
      1. persiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
      2. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
      3. persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
      4. persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi Publik kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi Publik

5. persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi Publik
6. persiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembang serta peningkatan kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi Publik
7. persiapan bahan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
8. persiapan bahan dan pengembangan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
9. persiapan bahan, pengembangan informasi, pelaksanaan diseminasi, dan pelayanan informasi kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
10. persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
11. persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
12. persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
13. persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya

4. <u>Bidang Penyelenggaraan e-Govermment dan Aplikasi</u>

a) Bidang Penyelenggaraan e-Govermment dan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

b) Bidang Penyelenggaraan e-Govermment dan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Informatika

c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Penyelenggaraan e-Govermment dan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :

1. persiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
2. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
3. persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
4. persiapan bahan dan pelaksanaan inventerisasi dan identifikasi kegiatan bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
5. persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
6. persiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembang serta peningkatan kegiatan bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
7. persiapan bahan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
8. persiapan bahan dan pengembangan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
9. persiapan bahan, pengembangan informasi, pelaksanaan diseminasi, dan pelayanan informasi kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
10. persiapan bahan, pengembangan informasi, pelaksanaan diseminasi, dan pelayanan informasi kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
11. persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
12. persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
13. persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi
14. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di lingkup pemerintah daerah

15. Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah
16. Penatalaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
17. Sinkronisasi Rencana Induk Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; dengan Anggaran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
18. Penyelenggaran Sistem Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
19. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
20. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan
21. Pelaksanaan Evaluasi dan Audit Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
22. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya

5. <u>Bidang Pengembangan Kota Cerdas</u>

a) Bidang Pengembangan Kota Cerdas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

b) Bidang Pengembangan Kota Cerdas mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan bidang Pengembangan Kota Cerdas dan mempunyai fungsi

1 persiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Kota Cerdas
2. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Pengembangan Kota Cerdas
3. persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Bidang Pengembangan Kota Cerdas
4. persiapan bahan dan pelaksanaan inventerisasi dan identifikasi kegiatan bidang Pengembangan Kota Cerdas
5. persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang Pengembangan Kota Cerdas
6. persiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembang serta peningkatan kegiatan bidang Pengembangan Kota Cerdas;

7. persiapan bahan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan Bidang Pengembangan Kota Cerdas;
8. persiapan bahan dan pengembangan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pengembangan Kota Cerdas
9. persiapan bahan, pengembangan informasi, pelaksanaan diseminasi, dan pelayanan informasi kegiatan Bidang Pengembangan Kota Cerdas
10. persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pengembangan Kota Cerdas
11. persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengembangan Kota Cerdas
12. persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengembangan Kota Cerdas
13. persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengembangan Kota Cerdas
14. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Cerdas yang terintegrasi
15. pembuatan Langkah Inovatif dan kreatif demi terciptanya keberlanjutan pengembangan kota cerdas
16. Pemberian dorongan dan arahan Perangkat Daerah untuk melaksanakan

6. <u>Bidang Statistik Dan Persandian</u>

a) Bidang Bidang Statistik Dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

b) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan bidang Statistik dan Persandian

c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bidang Statistik Dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

1. persiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan Bidang Statistik dan Persandian

2. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Statistik dan Persandian
3. persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Bidang Statistik dan Persandian;
4. persiapan bahan dan pelaksanaan inventerisasi dan identifikasi kegiatan bidang Statistik dan Persandian
5. persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang Statistik dan Persandian serta keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
6. persiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembang serta peningkatan kegiatan bidang Statistik dan Persandian
7. persiapan bahan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian
8. persiapan bahan dan pengembangan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Statistik dan Persandian
9. persiapan bahan, pengembangan informasi, pelaksanaan diseminasi, dan pelayanan informasi kegiatan Bidang Statistik dan Persandian
10. persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Statistik dan Persandian
11. persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian
12. persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian
13. persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian
14. pengkoordinasian pengumpulan, perekaman, pengolahan dan verifikasi data, serta penyajian data dalam rangka memberikan pelayanan informasi pembangunan
15. pengkoordinasian penyusunan data statistik dalam skala kabupaten dan menyajikan dalam bentuk buku kabupaten dalam angka, kecamatan dalam angka, monografi dan peta wilayah

16. pengoordinasian pengumpulan, penyusunan, pendistribusian dan pengelolaan berita, surat kawat dana atau radiogram
17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan kewenangannya

A.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana.

Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan. Adapun ketersediaan prasarana dan sarana yang disajikan dalam tabel inventarisasi berikut :

Daftar prasarana dan sarana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong

NO	Nama Barang	Jumlah
1	Bangunan Kantor	1
2	Lemari Es	3
3	Microphone	2
4	Lemari Besi/Metal	14
5	Filing Cabinet Besi	6
6	Brandkas	1
7	Lemari Kaca	1
8	Meja Kerja	22
9	Meja Kerja Pejabat Eseleon III	5
10	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3
11	Kursi Putar	19
12	Kursi Tamu	3
13	Meja Rapat	11
14	Kursi Besi/Metal	33
15	Kursi biasa	29
16	AC Central	2
17	AC Split	16
18	Papan Nama Instansi	2
19	Layar Film/Projector	2
20	Kipas Angin	2
21	Televisi	15
22	Dispenser	2
23	PC Unit	12
24	Laptop	41
25	Note Book	1
26	Printer	20
27	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1

28	Unit Power Supply	1
29	Tablet PC	6
30	Video Tron	4
31	Camera Vidio	3
32	Kendaraan Dinas :	
	Roda Empat	7
	Roda Dua	14
33	Baggage Trolly	1

Data : Pengurus Barang s/d Desember 2025

A.3. Jumlah Pegawai, Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sampai dengan akhir Desember 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong memiliki 45 orang pegawai ASN, dengan rincian 30 orang pegawai laki – laki dan 15 orang pegawai perempuan. Data sampai dengan akhir Desember 2025

Adapun berdasarkan pangkat dan golongan, kualifikasi Pendidikan, jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana table-tabel dibawah ini :

Tabel A.3.1
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sampai dengan 31 Desember 2025 - berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	0	1
2	Pembina Tk. I	(IV/b)	1	0	1
3	Pembina	(IV/a)	2	2	4
4	Penata Tk. I	(III/d)	7	2	9
5	Penata	(III/c)	0	3	3
6	Penata Muda Tk. I	(III/b)	2	1	3
7	Penata Muda	(III/a)	12	4	16
8	Pengatur Tk. I	(II/d)	1	1	2
9	Pengatur	(II/c)	1	0	1
10	Pengatur Muda	(II/a)	3	2	5
	Jumlah		30	15	45

Data : Sub Bagian Umum Kepegawaian s/d Desember 2025

Tabel A.3.2
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sampai dengan 31 Desember 2025 - berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis kelamin					
		Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
1.	Strata 2 (S2)	5	orang	2	orang	7	Orang
2.	Strata 1 (S1)	20	orang	10	orang	30	Orang
3.	Sarjana Muda (D3)	1	orang	1	orang	2	Orang
4.	SLTA/sederajat	4	orang	2	orang	6	orang
	Jumlah	30	orang	15	orang	45	orang

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s/d Desember 2025

Tabel A.3.3
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sampai dengan 31 Desember 2025 - berdasarkan Jabatan Struktural / Eselonering

No.	Jabatan struktural	Eselon	Jenis kelamin					
			Laki - Laki		Perempuan		Jumlah	
1	Kepala Dinas	Eselon II	1	orang	0	orang	1	orang
2	Sekretaris	Eselon III	1	orang	0	orang	1	orang
3	Kepala Bidang	Eselon III	3	orang	1	orang	4	orang
4	Kepala Sub bagian	Eselon IV	1	orang	2	orang	3	orang
		Jumlah	6	orang	3	orang	9	orang

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s/d Desember

Tabel A.3.4
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sampai dengan Desember 2025 - berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan	Jenis kelamin					
		Laki – Laki		Perempuan		Jumlah	
1	Pranata Humas Ahli Muda	1	Orang	2	orang	3	orang
2	Pranata Komputer Ahli Muda	2	Orang	1	orang	3	orang
3	Analis Kebijakan Ahli Muda	1	Orang	0	orang	1	orang
4	Penelaah Teknis Kebijakan	2	Orang	1	orang	3	orang

5	Pranata komputer Ahli Pertama	6	Orang	1	orang	7	orang
6	Statistisi Ahli Pertama	1	Orang	2	orang	3	orang
7	Pranata Humas Ahli Pertama	0	Orang	1	orang	1	orang
8	Analis Kebijakan Ahli Muda	1	Orang	0	orang	1	orang
9	Pengelola Barang Milik Negara	0	Orang	1	orang	1	orang
10	Pranata Komputer Terampil	1	Orang	0	orang	1	orang
11	Penata Layanan Operasional	5	Orang	1	orang	6	orang
12	Pengadministrasi Perkantoran	2	Orang	1	orang	3	orang
13	Operator Layanan Operasional	2	Orang	1	orang	3	orang
	Jumlah	24	Orang	12	orang	36	orang

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s/d Desember 2025

Tabel A.3.5
Jumlah pppk
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
sampai dengan Desember 2025 - berdasarkan Jabatan

No.	Nama Jabatan	Jenis kelamin					
		Laki – Laki		Perempuan		Jumlah	
1.	Pranata Komputer Ahli Pertama	3	Orang	0	orang	3	orang
2.	Penata Layanan Operasional	5	Orang	1	orang	6	orang
3.	Pengadministrasi Perkantoran	1	Orang	1	orang	2	orang
4.	Operator Layanan Operasional	2	Orang	1	orang	3	orang
	Jumlah	11	Orang	3	orang	14	orang

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s/d Desember 2025

B. Perencanaan Pembangunan

B.1. Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabalong 2025-2029

Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 terpilih adalah **"Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)"** dengan makna secara keseluruhan, "TABALONG SMaRT" adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama

Sedangkan Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

1 Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
2 Mendorong Kemajuan Daerah
3 Mengembangkan Kehidupan yang Religius
4 Menjadi Daerah yang Terdepan

Di dalam RPJMD misi yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong yaitu misi keempat Menjadi Daerah yang Terdepan. Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Hal ini mencakup upaya terbaik dalam memberikan layanan publik yang prima, pembangunan infrastruktur yang modern dan inklusif, serta daya saing ekonomi yang tinggi dengan tetap mempertahankan identitas lokal dengan prinsip keberlanjutan. Langkah-langkah yang diupayakan untuk menjadi daerah yang terdepan, yaitu :

a) menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah melalui sistem meritokrasi; dan
b) berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Berdasarkan misi yang harus diemban maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 menetapkan tujuan yaitu "Meningkatnya tata kelola pelayanan publik berbasis digital".

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong priode tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Satu Desa Satu Wifi Gratis
2. Satu Desa Satu Da'i
3. Tabalong Pasti Sehat
4. Mencetak 15.000 Tenaga Terampil
5. 1.000 Beasiswa Sarjana
6. Jalan Dan Jembatan Mantap

7. Kredit Modal Untuk UMKM Dan Petani

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang berhubungan langsung dengan misi ke 4 (empat) , yaitu " Menjadi Daerah yang Terdepan", dan selaras dengan program pembagunan prioritas 1 (satu) yaitu " Satu Desa Satu Wifi Gratis".

B.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan visi,misi dan tujuan guna mencapai sasaran diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Adapun strategi dan kebijakan yang telah disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong periode 2025 - 2029 dapat dijabarkan sebagai sebagaimana tabel B.2.1 sebagai berikut :

VISI RPJMD : ***"Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan) "***
MISI RPJMD KE IV : ***"Menjadi Daerah yang Terdepan"***
TUJUAN RPJMD : ***"Menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi, pembangunan, dan pelayanan publik"***
SASARAN RPJMD : ***Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih***

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik	- Penguatan digitalisasi layanan publik. - Meningkatkan keterbukaan data dan akuntabilitas terkait kebijakan daerah anggaran. - Meningkatkan fungsi pengawasan internal dan mendorong peran media dalam transparansi kebijakan. - Menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses untuk laporan penyimpangan.
	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Perluasan akses internet dan jaringan telekomunikasi yang merata dan berkualitas.	Penyediaan Wi-Fi gratis di fasilitas publik seperti sekolah, kantor desa, dan ruang terbuka hijau.
	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan statistik sektoral di daerah	Pengembangan pusat data dalam mendukung penguatan SDI.	- Memperkuat penerapan Satu data Indonesia (SDI) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data pemerintahan. - Menyiapkan dan membangun pusat data terintegrasi untuk mengoptimalkan manajemen informasi antarinstansi.

	Meningkatnya keamanan Informasi pemerintah daerah		Memperkuat cybersecurity untuk mencegah serangan siber dan kebocoran data.
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		

B.3. Program Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong menetapkan program-program yang akan dilaksanakan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam reancana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 -2029 dan menurut urusan pemerintahan.

Adapun program yang diharapkan dapat mewujudkan prioritas yang hendak dicapai pada tahun 2025 -2029 yang merangkum Program Prioritas Kepala Daerah selanjutnya diimplementasikan dalam program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut melalui :

Program Prioritas Daerah	Program Prioritas KDH	Nama Program	Nama Kegiatan
Satu Desa Satu Wifi Gratis	Program Prioritas ke 1 (satu) yaitu : Satu Desa Satu Wifi Gratis	1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			2 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		3 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		4 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika priode 2025 – 2029 dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang menunjang pencapaian maupun keberhasilan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ada 5 (lima) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan seperti dibawah ini :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

   Sub Kegiatan :

   1) Relasi Media
   2) Pelayanan Informasi Publik
   3) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
   4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
   a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan:

   1) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

   b. Kegiatan Pengelolaan *e-Government* dilingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan:

   1) Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
   2) Koordinasi penyusunan proses bisnis
   3) Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
   4) Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
   5) Koordinasi penyusunan dan/ atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
   6) Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
   7) Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
   8) Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah

Daerah

9) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
10) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
11) Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
12) Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
13) Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
14) Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
15) Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
16) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
17) Penyediaan Akses Internet
18) Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
19) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      1) Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektora
      2) Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
      3) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektora
      4) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
      5) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
      6) Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik

Nasional

7) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
8) Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
9) Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
10) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
11) Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
6) Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
7) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
8) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Pengaggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
      2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

   d. Kegiatan Adminiatrasi Umum Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3) Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
      4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
      5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Pengadaan Mebel
      2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

C. Prioritas Pembangunan

Selanjutnya Prioritas Pembanguan Program Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong dalam upaya mendukung pencapaian program prioritas Bupati Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program dengan 12 (dua belas) kegiatan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan, seperti dibawah ini :

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
   a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

      Sub Kegiatan :

      1) Relasi Media
      2) Pelayanan Informasi Publik
      3) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
      4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik

a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
   a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan:

      1) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

   b. Kegiatan Pengelolaan *e-Government* dilingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan:

      1) Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
      2) Koordinasi penyusunan proses bisnis
      3) Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
      4) Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
      5) Koordinasi penyusunan dan/ atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
      6) Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
      7) Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah

daerah

8) Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
9) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
10) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
11) Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
12) Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
13) Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1) Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektora
2) Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
3) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektora
4) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
5) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

c. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Pengaggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs

d. Kegiatan Adminiatrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2025– 2029 dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 yang menunjang pencapaian maupun keberhasilan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.A.1
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Pemasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.889.000,-	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen Persentase Kenaikan Nilai komponen Pelaporan pada Lakip Diskominfo 78,70 BB	42,697,801,-	Tersusunnya .Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen Persentase Kenaikan Nilai komponen Pelaporan pada Lakip Diskominfo 78,70 BB	Pada prinsipnya semua sudah terlakasana hanya ada item Perjadin yang tidak semua terealisasi	Melakukan evaluasi terhadap rincian kegiatan
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	17.108.000,-	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	11,571,600,-	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pada prinsipnya semua sudah terlakasana hanya ada item Perjadin yang tidak semua terealisasi	Melakukan evaluasi terhadap rincian kegiatan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.425.651.000,-	Tersedianya Gaji dan Tunjangan 14 bulan	6,193,264,692,-	Tersedianya Gaji dan Tunjangan 14 bulan	Penyiapan Gaji dan tunjangan	Anggaran yang tersedia telah terealisasi dan terlaksana
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.709.120,-	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut 40 Orang	31,990,000,-	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut 40 Orang	Sesuai dengan kebutuhan ASN yang ada di Diskominfo	Penyesuaian harga dgn SBU yg ada dan Jumlah ASN yg masih aktif.
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	310.045.000,-	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	191,076,880,-	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Adanya beberapa Diklat dan Pelatihan yang	Pengganggaran dan pemilihan Diklat lebih

							Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25 orang		Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25 orang	tidak sempat diikuti	terencana lagi di tahun depan.
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.794.104,-	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor 7 Item	13,637,000,-	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor 7 Item	Sesuai dengan kebutuhan	Sesuai dengan kebutuhan
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.849.615,-	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Macam	86,133,041,-	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Macam	Sesuai dengan harga dan kebutuhan	Pengganggaran Tahun 2026 lebih terencana dengan baik.
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.767.893,-	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 2 paket	10,347,800,-	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 2 paket	Sesuai dengan kebutuhan	Pengganggaran lebih terencana lagi
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000,-	Tersediany a bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 dokumen		Tersediany a bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 dokumen	Kurangnya kapasitas SDM dalam melaksanakan pengadaan sehingga tidak terealisasi	Meningkatkan kapasitas SDM untuk mengikuti pelatihan pengadaan Barang/Jasa
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.982.178,-	Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Daerah, luar Daerah dan Bimtek 50 Laporan	194,631,215,-	Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Daerah, luar Daerah dan Bimtek 50 Laporan	Sesuai dengan kebutuhan dan tidak diikutinya beberapa Bimtek / Diklat.	Pengganggaran lebih terencana lagi

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Mebel	6.347.190,-	Tersediany a Mebel 10 unit	6,105,000,-	Tersediany a Mebel 10 unit	Belanja barang Sesuai dengan standar harga	Sesuai dengan harga
				Pemerintah Daerah							
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.147.536,-	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17 unit	245,310,000,-	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17 unit	Belanja barang Sesuai dengan standar harga	Sesuai dengan harga
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.983.694,-	Persedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20 Unit	62,409,750,-	Persedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20 Unit	Belanja barang Sesuai dengan standar harga	Sesuai dengan harga
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	443.400.000,-	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72 Laporan	199,155,701,-	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72 Laporan	Sesuai dengan Tagihan/Struk	Antisipasi Kenaikan Tarif
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.073.790.880,-	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 126 laporan	522,914,556,-	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 126 laporan	Sesuai Kebutuhan	Pengganggar an lebih terencana lagi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	461.860.000,-	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26 unit	211,788,295,-	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26 unit	Sesuai Kebutuhan	Pengganggar an lebih terencana lagi
					Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	277.908.430,-	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 unit	261,907,521,-	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 unit	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan rehab ruangan.	Pengganggaran akan dilakukan lebih terencana lagi

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	58.500.000,-	Terlaksananya Pemeliharaan/	7,434,700,-	Terlaksananya Pemeliharaan/Re	Sesuai dengan Kebutuhan	Kedepan akan disesuaikan
					dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29 unit		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29 unit		dengan kebutuhan yang riil.
2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Relasi Media	4.708.360.000,-	Terlaksananya Relasi Media 24 laporan	4,550,020,481,-	Terlaksananya Relasi Media 24 laporan	Anggaran yang tersedia hanya cukup berkontrak selama 9 bulan pada anggaran induk	Menambah anggaran agar cukup berkontrak selama 12 bulan pada APBD Perubahan
					Pelayanan Informasi Publik	374.997.796,-	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik 4 Permohonan	187,777,669,-	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik 4 Permohonan	Bimbingan teknis dan Workshop PPID Pelaksana dan PPID Utama belum optimal pelaksanaannya	Mengoptimalkan Bimbingan teknis dan Workshop PPID Pelaksana dan PPID Utama
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	60.359.700,-	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 4 rekomendasi	15,402,000,-	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 4 rekomendasi	Bimbingan teknis dan Workshop SP4N LAPOR optimal pelaksanaannya	Mengoptimalkan Bimbingan teknis dan Workshop SP4N LAPOR
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.578.365.000	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik 24 media	3,556,488,175,-	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik 24 media	Jumlah peserta kegiatan lomba foto kurang dari target	Meningkatkan sosialisasi dan promosi kegiatan lomba foto dan memperpanjang masa pendaftaran peserta

3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	28.607.000,-	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Pemerintah Daerah 1 dokumen	24,300,416,-	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Pemerintah Daerah 1 dokumen	Tingginya tingkat serangan cyber berupa upaya dDos, Deface, dan Sisipan Malware	Menggunakan lisensi keamanan tambahan dari CloudFlare
				Pengelolaan *e-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	170.136.138,-	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional 20 Aplikasi 4 dokumen	169,467,458,-	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional 20 Aplikasi 4 dokumen	Terkendala akses kendali atas server aplikasi yang berada di PDN	Koordinasi dengan pihak PDN agar gangguan cepat teratasi Membangun server backup / DRC dilokasi berbeda
					Koordinasi penyusunan proses bisnis	12.280.000,-	Terlaksananya Koordinasi penyusunan proses bisnis 4 dokumen		Terlaksananya Koordinasi penyusunan proses bisnis 4 dokumen	Koordinasi aplikasi umum telah dilaksanakan oleh SKPD pengampu sehingga tidak memerlukan anggaran diskominfo	Melakukan koordinasi dengan bagian organisasi serta bapperida dan dinas terkait
					Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	16.360.000,-	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 2 laporan	4,080,000,-	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 2 laporan	Pada tahun 2025 kabupaten Tabalong tidak termasuk dalam Evaluasi SPBE	Melakukan persiapan dengan mengikuti sosialisasi Pemerintahan Digital (PEMDI)
					Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	2.040.000,-	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi 2 dokumen	2,040,000,-	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi 2 dokumen	Tidak ada Permasalahan	Melakukan koordinasi dan evaluasi berkelanjutan

					Koordinasi penyusunan dan/ atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	352.755.424,	Terlaksananya Koordinasi penyusunan dan/ atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah 4 dokumen	339,849,585,-	Terlaksananya Koordinasi penyusunan dan/ atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah 4 dokumen	Tidak ada permasalahan (Sesuai dengan proses pengadaan)	Melakukan koordinasi dan reviu berkelanjutan
					Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	23.813.500	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 2 dokumen	10,929,011,-	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 2 dokumen	Karena adanya perubahan aturan dari SPBE ke PEMDI	Melakukan rapat koordinasi penetapan target indeks PEMDI

					Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	102.743.500,	Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 12 Aplikasi	75,293,467,-	Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 12 Aplikasi	Terkendala kurangnya SDM Programmer untuk fasilitasi pembangunan dan pengembangan aplikasi	Membuat skala prioritas pada aplikasi yang dikembangkan
					Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	13.049.500,-	Terlaksananya Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 2 dokumen	10,972,101,-	Terlaksananya Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 2 dokumen	Belun adanya aturan terkait aplikasi pengaanggaran SPBE (EGA SPBE)	Melakukan persiapan dengan mengikuti sosialisasi Pemerintahan Digital (PEMDI)
					Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraa n Kabupaten atau Kota Cerdas	4.639.451.295,-	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraa n Kabupaten atau Kota Cerdas 4 unit	4,214,654,333,-	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 4 unit	Terhambatannya proses pengadaan barang/jasa karena relokasi ruangan *Command Center*	Pengadaan Barang/Jasa Sesuai kebutuhan.
					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.840.647.724	Terlaksananya Penyelenggaraa n Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 100 %	4,665,521,638,-	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 100 %	Belum maksimal nya utilisasi serapan Bandwitdh seluruh SKPD.	Melakukan revitalisasi JIP seluruh SKPD. Sosialisasi pemanfaatan dan perawatan internet JIP bagi seluruh SKPD.
					Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	70.902.989,-	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 4 dokumen	48,285,403,-	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 4 dokumen	Tidak ada Permasalahan	Sesuai kebutuhan

					Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	77.827.500,-	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 2 dokumen	22,729,500,-	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 2 Dokumen	Karena adanya efesien anggaran BPS Pusat diklat prakom secara luring ditiadakan tetapi dilaksanakan secara daring sehingga serapan anggaran kontribusi diklat prakom tidak terserap maksimal	Mengikuti diklat Prakom secara daring
					Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	9.240.000,-	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 2 Aplikasi		Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 2 Aplikasi	Koordinasi aplikasi umum telah dilaksanakan oleh SKPD pengampu sehingga tidak memerlukan anggaran diskominfo	Penganggaran lebih terencana lagi.
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	157.905.040,-	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 80 orang	102,393,794,-	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 80 orang	Adanya beberapa sosialisasi yang awalnya direncanakan dilaksanakan di luar daerah	Adanya beberapa sosialisasi yang awalnya direncanakan dilaksanakan di dalam daerah
					Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	188.512.400,-	Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik 100%	171,110,672,-	Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik 100%	Adanya beberapa sosialisasi yang awalnya direncanakan dilaksanakan di luar daerah	Beberapa sosialisasi yang awalnya direncanakan dilaksanakan di dalam daerah
					Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	56.335.000,-	Meningkatnya Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 60 %	26,558,424,-	Meningkatnya Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 100 %	Sesuai Kebutuhan	Pengganggaran lebih terencana lagi

					Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	134.999.480,-	Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia 6 dokumen	79,471,310,-	Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia 11 dokumen	Adanya beberapa sosialisasi yang awalnya direncanakan dilaksanakan di luar daerah	Beberapa sosialisasi yang awalnya direncanakan dilaksanakan di dalam daerah
					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	26.496.000,-	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 5 dokumen	1,805,000,-	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 11 dokumen	Sesuai Kebutuhan	Pengganggaran lebih terencana lagi
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.052.200,-	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 dokumen	58,721,213,-	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3 dokumen	Adanya beberapa sosialisasi yang tidak dapat dilaksanakan secara offline	Beberapa sosialisasi yang tidak dapat dilaksanakan secara online (Zoom Meeting)
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	144.061.700,-	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 laporan	114,531,732,-	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 laporan	Sesuai Kebutuhan	Pengganggaran lebih terencana lagi
					Pelaksanaan Keamanan Informasi	52.338.000,-	Terlaksananya Keamanan Informasi	32,976,414,-	Terlaksananya Keamanan Informasi	Sesuai Kebutuhan	Pengganggaran lebih terencana lagi
					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik 1 laporan		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik 1 laporan	Sesuai Kebutuhan	Pengganggaran lebih terencana lagi

					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	46.337.500,-	Terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 39 Perangkat Daerah	33,378,350,-	Terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 39 Perangkat Daerah	Sesuai Kebutuhan	Pengganggaran lebih terencana lagi
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	53.854.000,-	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 39 Perangkat Daerah	22,942,764,-	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 39 Perangkat Daerah	Sesuai Kebutuhan	Pengganggaran lebih terencana lagi
TOTAL						**32.999.362.026**		**26,839,633,685,-**			

B. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel B.1
Catatan Strategis Dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tabalong Terhadap pelaksanaan Pogram dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No.	Catatan Strategis	Rekomendasi	Tanggapan Tindak Lanjut
1	Kurangnya layanan informasi data terpadu yang ada di kabupaten Tabalong.	Perlunya agar diskominfo membuat *Command Center*agar lebih memudahkan dalam memberikan informasi yang terhimpun menjadi satu, agar memudahkan kepala daerah dan masyarakat dalam mendapatkan informasi terbaru.	Dinas Komunikasi dan Informatika telah mulai menyusun rencana pembangunan *Command Center*sebagai pusat informasi daerah dan melakukan integrasi data dari berbagai SKPD.
2	Masih banyak blind spot di kawasan Tabalong.	Lakukan kerjasama dengan provider hingga tabalong tidak ada lagi Kawasan tanpa signal.	Telah dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa provider telekomunikasi untuk memperluas jaringan di wilayah Tabalong. Selain itu, Dinas Kominfo juga telah menyampaikan usulan pembangunan BTS ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sesuai kewenangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa lokasi yang belum dapat dipasangi BTS karena pertimbangan jumlah penduduk, kondisi infrastruktur, serta aspek kelayakan bisnis dari pihak provider. Saat ini, secara umum wilayah Kabupaten Tabalong sudah tidak memiliki blind spot, namun masih

			terdapat beberapa area dengan kualitas sinyal yang lemah

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

B. Gambaran Umum Tugas Pembantuan

Tabel 3.B.1
Gambaran umum Tugas Pembantuan

No.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Urusan yang ditugas pembatuan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	-	-	-	-

C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

Tabel 3.C.1.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten
Tahun 2025

No	K / LNPK	Dasar pelaksanaan penugasan (TP)	Program Kegiatan output rincian kegiatan	Lokasi	PD pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%	Realisasi capaian kegiatamn	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Tugas Pembantuan provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

Tabel 3.C.2.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi
yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten
Tahun 2025

No	Urusan bidang	Dasar pelaksanaan penugasan (TP)	Program kegiatan output rincian kegiatan	Kab/ kota	PD pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%	Realisasi capaian kegiatamn	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintaan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintah Dibawahnya (Pemerintahan Desa)

Tabel 3.D.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang Diberkan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2025

No	Urusan bidang	Dasar pelaksanaan penugasan (TP)	Program Kegiatan output rincian kegiatan	Kab/ kota	PD pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%	Realisasi capaian kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E. Hambatan / Permasalahan dan Upaya Penyelesaian (Saran tindak Lanjut)

(Tidak ada melaksanakan tugas pembantuan)

BAB IV
CAPAIAN MAKRO ATAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Visi	:	Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)
Misi	:	Menjadi Daerah yang Terdepan
Tujuan	:	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Digital
Sasaran	:	- Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik - Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) - Meningkatnya keamanan Informasi pemerintah daerah - Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan statistik sektoral di daerah - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
Strategi	:	- Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik. - Penerapan aturan dan standar dalam pengembangan aplikasi, pengelolaan infrastruktur digital, dan penyiapan SDM IT. - Peningkatan aksesibilitas layanan TIK di ruang public. - Penguatan kebijakan penyelenggaraan kota cerdas (smart city) sesuai Permenkominfo dan Permendagri. - Data berkualitas - Keamanan informasi
Arah Kebijakan	:	- Mengembangkan tatakelola Keterbukaan Informasi Publik yang Informatif. - Perencanaan program, penyusunan petunjuk teknis, pembinaan dan pengendalian urusan Aplikasi Informatika. - Penyediaan layanan internet gratis dan CCTV pada RTH, ruang publik, pendidikan, dan fasilitas umum. - Peningkatan pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik melalui pengembangan sistem Smart City. - Peningkatan peran serta penyelenggara satu data Indonesia di Kabupaten Tabalong dalam penyediaan data berkualitas Peningkatan pembinaan teknis statistic - □ Peningkatan kesadaran tentang pentingnya keamanan informasi dalam Pengelolaan Sistem Elektronik ➢ Peningkatan kapasitas SDM keamanan informasi di semua perangkat daerah ➢ Optimalisasi peran Tim Tanggap Insiden Siber ➢ -Penguatan regulasi tentang keamanan informasi dan evaluasi implementasinya

Capaian makro Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang dilaksanakan oleh Bidang Informasi Komunikasi Publik dimana Media Center merupakan pusat informasi dan komunikasi publik yang menjadi tempat untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapat layanan sosial ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Media Center Tabalong terdiri dari TV Tabalong, Radio Suara Tabalong dan Media Center yang dikelola oleh di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Peran media center dikembangkan dengan melakukan penyerapan informasi dari berbagai kalangan, mengolah data, analisa data kemudian pengemasan informasi yang akan disebarluaskan kepada publik dan dijadikan umpan balik bagi pengambil kebijakan. Dalam konteks antar lembaga/instansi, media center dapat dikembangkan sebagai wahana koordinasi komunikasi dan pertukaran informasi antar lembaga pemerintahan dan juga masyarakat, antara lain :

a. Sarana Internet

Kemajuan teknologi informasi tidak terbatas jarak dan waktu, karena informasi apapun dapat kita peroleh dari sarana ini. Untuk menunjang sarana akses Internet sudah disiapkan Dinas Kominfo bahkan Jaringan konektifitas sudah menjangkau semua SKPD, 12 Kecamatan dan 16 Puskesmas di wilayah Kabupaten Tabalong.

b. Publikasi Berita

Selain itu juga untuk memberikan informasi publik, Media Center meliputi dan mengisi berita-berita mengenai segala kegiatan di Kabupaten Tabalong. Adapun kanal kanal yang sudah tersedia antara lain :

Media Internal

https://portal.tabalongkab.go.id
https://diskominfo.tabalongkab.go.id
https://mc.tabalongkab.go.id
https://tvtabalong.com
https://suaratabalongfm.com
https://infopublik.id
https://satukannegeri.com

Media Eksternal terdiri dari media cetak, media elektronik dan media siber (online)

Media Cetak

Tempo

Banjarmasin Post

Barito Post

Kalimantan Post

Kalsel Pos

Mata Banua

Radar Banjarmasin

Media Siber/Online

Antaranews.com

Apahabar.com

Jejakrekam.com

Kalimantanlive.com

Klikkalsel.com

Lenterakalimantan.com

Sekata.id

Teras7.com

Liputan24.net

Redaksi8.com

Tabirkota.com

Tribunnews.com

Wartabanjar.com

Media elektronik

Kompas TV

i-News

Media Cetak Lokal Mingguan-Bulanan

Bebas Baru

Bebas News

Koran Barito

Koran Kontras

Mercu Benua

Metro 7

Saraba kawa Post

Tribune Plus

Warta Banua

X-kasus

c. **Sarana Informasi Publik**

Dinas Kominfo Tabalong juga merupakan Koordinator dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Tabalong, sebagai koordinator kami juga meyediakan layanan berbasis online melalui kanal website https://ppid.tabalongkab.go.id juga mengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (**SP4N**) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (**LAPOR**!) melalui kanal www.lapor.go.id

Pada tahun 2025 Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong selalu menjalin hubungan dan senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat yaitu Kemkominfo RI dan LKBN Antara, Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Informasi publik.

Dari tahun 2004 s.d. tahun 2025 telah berdiri TV Tabalong. Peran TV Tabalong ini digunakan untuk :

a. Penyampaian informasi-informasi pembangunan daerah (dari tahun 2004 s/d 2015 tayang 1 kali seminggu dengan durasi 1 jam dan dari tahun 2018 s/d sekarang tayangnya setiap hari dengan durasi waktu 5 jam dan dari 2019 s.d. sekarang durasi jam tayang selama 15 Jam perhari)
b. Siaran langsung untuk moment-moment tertentu dan bisa dilihat langsung melalui Media Massa di akun Facebook, Instagram dan Kanal Youtube khusus berita 'Tabalong Hari Ini' dan khusus live dan feature 'Program TV Tabalong'.
c. Beberapa layanan yang disiapkan oleh TV Tabalong antara lain *Breaking News, Liputan Khusus, Live Event, Multimedia, Blocking Program, Advetorial, Virtual Meeting.*

Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan program dan kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan statistik sektoral di daerah, yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain berupa sosialisasi, diseminasi, dan rapat-rapat koordinasi untuk meningkatkan

pengetahuan dan kesadaran semua pemangku kepentingan tentang statistic sectoral; fasilitasi dan pendampingan penyusunan rancangan kegiatan statistic; fasilitasi dan pendampingan pengajuan rancangan kegiatan statistic; pengumpulan dan pemeriksanaan data statistic; fasilitasi penyebarluasan data statistic; dan pengembangan infrastruktur statistik.

Capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada tahun 2025 terealisasi 100%. Semua perangkat daerah menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Melalui Sub.Kegiatan Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan berupa rapat-rapat koordinasi dengan *stakeholders* yang terdiri atas Bapperida selaku Koordinator sekretariat Satu Data Kabupaten Tabalong, semua Organisasi Perangkat Daerah selaku produsen data, BPS selaku Pembina data. Hasil yang diperoleh berupa dokumen data sektoral daerah Kabupaten Tabalong, dokumen metadata, dan laporan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal. Untuk kegiatan statistik yang dilaksanakan tahun 2025 telah dilakukan pendampingan penyusunan rancangan dan fasilitasi pengajuan kegiatan statistik untuk kegiatan survei dan kompilasi produk administrasi penyusunan data statistik sektoral. Sebanyak OPD sebanyak 12 kegiatan statistik dengan rincian tiga rekomendasi terbit untuk pendataan lengkap, tiga kompromin, dan enam survei..

Melalui Sub.Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral telah dilakukan fasilitasi terhadap pembinaan statistik yang dilakukan oleh Pembina Data (BPS) sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu kegiatan pembinaan kepada 6 (enam) perangkat daerah, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Perencanaan Pengembangan, Riset, dan Inovasi Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Pendapatan Daerah . Ada pula rangkaian kegiatan daftar data, yakni Perencanaan, Identifikasi, Pengumpulan, dan Pemeriksaan Daftar Data dimana Peserta yang diundang dalam kegiatan ini terdiri atas semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), semua Kasubbag perencanaan, serta beberapa OPD yang melakukan penghimpunan data

statistik secara regular.

Melalui Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia telah dilakukan pengembangan infrastruktur juga dilakukan oleh Bidang Statistik dan Persandian, pengembangan terhadap Sistem Elektronik yang menjadi alat bantu untuk memudahkan penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sudah memiliki aplikasi BATIK (Basis Data Statistik Sektoral) Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembuatan wajah baru untuk portal BATIK ini dan telah dilakukan integrasi Portal BATIK dengan Portal Satu Data Indonesia (SDI). Selain itu, juga telah dilakukan kegiatan Forum Satu Data Kabupaten Tabalong dalam rangka musyawarah dan pengambilan kesepakatan mengenai capaian data Kabupaten Tabalong tahun 2025.

Melalui Sub.Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional, telah dilakukan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Statistik Kabupaten Tabalong. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Bidang Statistik dan Persandian selaku walidata bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina data membuat dua tim. Pertama, Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral . Kedua ialah Tim Pengembangan dan Pemanfaatan Big Data dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Melalui Sub.Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar, telah dilakukan Pemeriksaan Lanjutan Data Statistik Sektoral dari Setiap OPD dan Sosialisasi Tata Cara Input Data di Portal Data.

Hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kabupaten Tabalong tahun 2023 adalah 2,19 dan mengalami kenaikan nilai yang signifikan menjadi 2,95 pada tahun 2024 dengan rincian berdasarkan dimensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Domain	Bobot	Nilai Nasional	Rata-rata Nilai Kabupaten se-Indonesia	Nilai Kabupaten Tabalong

Prinsip SDI	28%	2,60	3,43	3,00
Kualitas Data	24%	2,60	2,27	3,00
Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	3,00
Kelembagaan	17%	2,60	2,32	3,09
Sistem Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,44
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	**100%**	**2,60**	**2,35**	**2,95**

Namun, pada tahun 2025 penilaian EPSS ditiadakan, sehingga kegiatan lebih difokuskan pada pembinaan kegiatan statistik sektoral ke beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. SKPD yang mendapatkan pembinaan pada tahun 2025 ialah sebagai berikut

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan kegiatan statistik sektoral berupa Survei Tingkat Gemar Membaca (TGM)
- Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan kegiatan statistik sektoral berupa Pendataan Lengkap Komoditas Tanaman Perkebunan dan Pendataan Lengkap Komoditas Peternakan
- Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan kegiatan statistik sektoral berupa Survei Produksi Perikanan Tangkap dan Survei Produksi Perikanan Budidaya
- Badan Perencanaan Pengembangan, Riset, dan Inovasi Daerah dengan kegiatan statistik sektoral berupa Pendataan Lengkap Pensasaran Program Kemiskinan Daerah
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan statistik sektoral berupa Profil Kependudukan dan Proyeksi Penduduk
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kegiatan statistik sektoral berupa Kompilasi Perizinan Berusaha, dan
- Badan Pendapatan Daerah dengan kegiatan statistik sektoral berupa Kompromin Pajak Daerah.

Adapun anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Statistik tahun 2025 sebanyak Rp.381.481.699,- yang terealisasi atau sekitar 67,61 % dari pagu keseluruhan Rp.564.247.920,-

Selama tahun 2025 telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja bidang persandian. Melalui subkegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM Persandian,

yakni pada kegiatan pelatihan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait metode dan teknik pengujian keamanan sistem informasi, jaringan, serta aplikasi. Sedangkan, melalui beberapa subkegiatan lainnya, seperti Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga lebih berfokus pada pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM Persandian. Adapun pada subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, telah diadakan Reviu dan Pendampingan Penyiapan Bukti Dukung Pengukuran Indeks KAMI dengan mengundang langsung tim dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Adapun untuk dua subkegiatan lainnya, yakni Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan tanda tangan elektronik (TTE). Pendampungan ini dilakukan dengan dua cara, yakni datang langsung ke Diskominfo atau secara online, melalui whatsapp chat yang telah dikembangkan oleh Bidang Statistik dan Persandian, yakni WaVer (WA Verifikator).

Harus diakui bahwa penyelenggaraan urusan persandian masih belum optimal. Penilaian Indeks Keamanan Informasi terhadap sampel Sistem Elektronik pada awalnya untuk di nilai oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk sistem elektronik dengan kategori tinggi nilainya masih berada dibawah 388 dan termasuk pada kategori tidak layak, namun setelah dilakukan beberapa pemenuhan bukti dukung kembali, nilainya berada pada nilai 549 dari nilai maksimal 918. Menurut standar Badan Siber dan Sandi Negara, nilai 549 masuk kategori pemenuhan kerangka kerja dasar.. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya kinerja penyelenggaraan urusan persandian ini, antara lain:

- Keterbatasan SDM, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Keterbatasan perangkat lunak dan keras yang mendukung.
- Kurangnya kesadaran semua pemangku kepentingan terhadap tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan informasi.

Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

dilaksanakan melalui 5 (lima) subkegiatan, dengan pagu anggarannya sebesar Rp 366.643.400,- dengan realisasi Rp 262.550.473,- atau sebesar 71,61%.

Capaian makro Program Aplikasi Informatika yang dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pada Tahun 2025 secara menyeluruh Diskominfo Tabalong telah memfasilitasi 121 Website desa dengan menggunakan CMS desa.tabalongkab.go.id. Pengelolaan Domain dan Subdomain untuk tabalogkab.go.id yang terkelola secara aktif sampai saat ini terdata sebanyak 290 Subdomain yang terdiri dari website seluruh OPD, Kecamatan, dan Puskesmas, Desa dan Aplikasi.

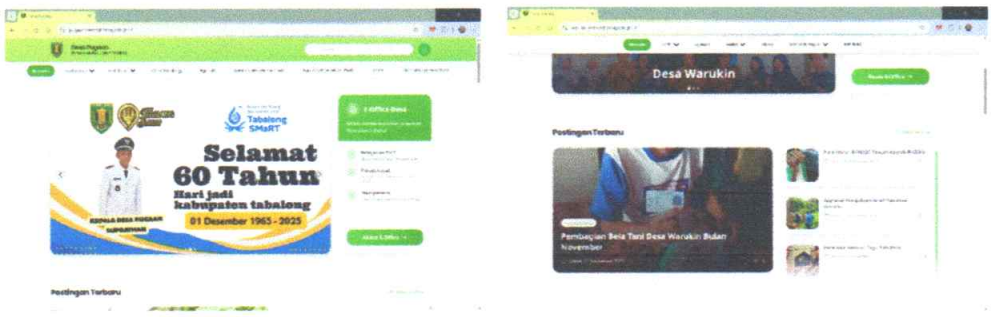

Portal Resmi Website Desa

b. Dalam upaya mendukung percepatan transformasi digital serta pemerataan akses informasi di seluruh wilayah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong secara konsisten memperluas jangkauan Jaringan Intra Pemerintah. Langkah strategis ini diselaraskan sepenuhnya dengan salah satu program prioritas Bupati Tabalong, yaitu '1 Desa 1 Wifi', yang bertujuan untuk menghadirkan keadilan akses digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Implementasi program ini diwujudkan melalui penyediaan Akses Internet di setiap desa yang ditempatkan secara strategis pada lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa. Penempatan di RTH ini dimaksudkan agar fasilitas internet dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara luas, sekaligus menjadikan area publik sebagai pusat kegiatan positif dan kreatif masyarakat desa.

Guna menjamin stabilitas dan kualitas layanan tersebut, pada tahun 2025 Diskominfo telah melakukan revitalisasi Kabel Udara (KU) sepanjang 12 Kilometer yang membentang dan didistribusikan dari Kantor Diskominfo

sampai ke Gedung RSUD Baddaruin Kasim, dibagi ke jalur arah menuju Pendopo – Kampus STIA, dari Simpang Tanjung Selatan – Simpang Nan Sarunai, kemudian EXPO Center – Gedung Mall Pelayanan Publik. Jaringan utama kini telah berbasis Fiber Optic (FO) untuk area dengan kepadatan trafik tinggi guna menjamin kecepatan akses yang maksimal.

Langkah revitalisasi ini memastikan jaringan internet pemerintah memiliki tingkat gangguan yang rendah dan daya tahan yang lebih baik terhadap cuaca. Sementara itu, untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, digunakan teknologi Wireless (Nirkabel) yang handal. Jaringan Intra Pemerintah yang dikelola sepanjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Perangkat Daerah	Fiber Optic	Wireless
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	V	
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong	V	
3	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	V	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	V	
5	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	V	
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	V	
7	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	V	
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	V	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	V	
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	V	
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	V	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	V	

13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	V	
14	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	V	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	V	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	V	
17	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	V	
18	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	V	
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	V	
20	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan HoRTikultura Kabupaten Tabalong	V	
21	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	V	
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	V	
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	V	
24	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	V	
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	V	
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	V	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	V	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	V	
29	RSUD H. Badaruddin Kasim	V	
30	Kecamatan Banua Lawas	V	
31	Kecamatan Bintang Ara	V	
32	Kecamatan Haruai	V	
33	Kecamatan Jaro	V	
34	Kecamatan Kelua	V	
35	Kecamatan Muara Harus	V	
36	Kecamatan Muara Uya	V	
37	Kecamatan Murung Pudak	V	
38	Kecamatan Pugaan	V	
39	Kecamatan Tanjung	V	
40	Kecamatan Tanta	V	
41	Kecamatan Upau	V	
42	Puskesmas Tanjung	V	
43	Puskesmas Mabuun	V	
44	Puskesmas Hikun	V	
45	Puskesmas Tanta	V	
46	Puskesmas Mungkur Agung	V	
47	Puskesmas Murung Pudak	V	
48	Puskesmas Haruai	V	
49	Puskesmas Pugaan	V	
50	Puskesmas Muara Uya	V	
51	Puskesmas Upau	V	

52	Puskesmas Jaro		V
53	Puskesmas Kelua	V	
54	Puskesmas Muara Harus	V	
55	Puskesmas Bintang Ara	V	
56	Puskesmas Tanta	V	
57	Puskesmas Wirang	V	
58	Puskesmas Banua Lawas	V	
59	Puskesmas Ribang	V	
60	Puskesmas Panaan	-	-
61	UPT Pengelolaan Pasar Tanjung	V	
62	UPT Pengelolaan Pasar Kelua	V	
63	UPT Pengelolaan Pasar Murung Pudak	V	
64	UPT Pengelolaan Pasar Muara Uya	V	
65	UPT Pengelolaan Pasar Haruai	V	
66	BBI Kambitin	V	
67	BPP Kembang Kuning	V	
68	BPP Jaro	V	
69	Kelurahan Hikun	V	
70	Kelurahan Agung	V	
71	Kelurahan Tanjung	V	
72	Kelurahan Sulingan	V	
73	Kelurahan Mabuun	V	
74	Kelurahan Pembataan	V	
75	Kelurahan Belimbing Raya	V	
76	Kelurahan Belimbing	V	
77	Kelurahan Jangkung	V	
78	Kelurahan Pulau	V	
79	Rumah Singgah Dinsos	V	
80	Gudang Obat Farmasi	V	
81	UPT Balai Uji Kendaraan	V	
82	UPT Lab. DLH	V	
83	Gudang Aset BPKAD	V	
84	RTH Tanjung	V	
85	RTH Taman 10K	V	
86	RTH Taman Bangun Sasri	V	
87	RTH Haruai	V	
88	RTH Muara Uya	V	
89	RTH Hikun Agri Park	V	
90	RTH Expo	V	
91	RTH Tanjung Bersinar Park	V	
92	RTH Stadion Sport	V	
93	RTH Kolam Renang	V	
94	RTH Pendopo Bersinar	V	
95	Wisma Tamu	V	
96	Aula Pendopo	V	
97	Rumah Dinas Bupati	V	
98	Rumah Dinas Ketua DPRD	V	
99	Gedung PKK	V	

100	Pos Jaga Dishub Selongan	V	
101	STIA Tabalong	V	

Adapun untuk data penyediaan akses internet di RTH Desa yaitu sebanyak 61 Desa, berikut untuk data dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

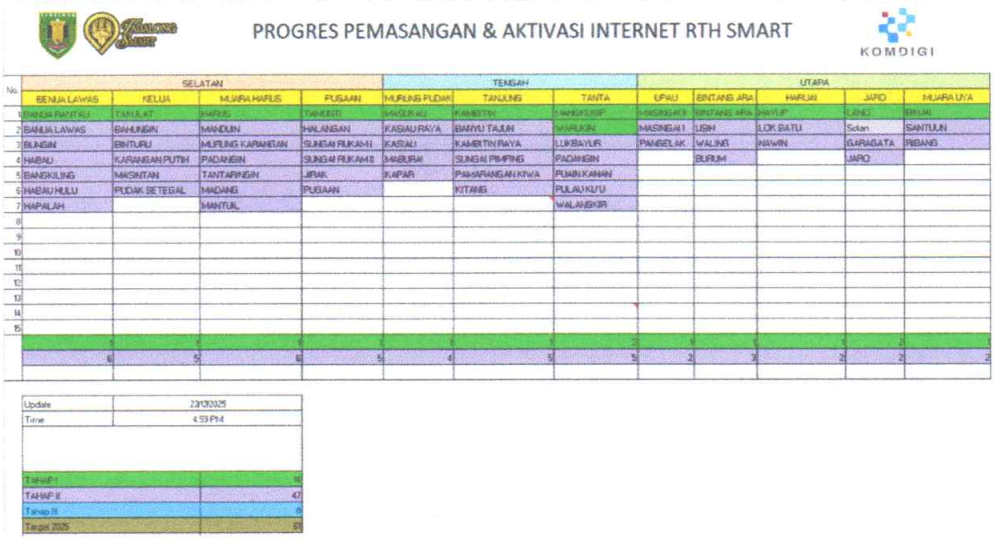

PROGRES PEMASANGAN & AKTIVASI INTERNET RTH SMART

KOMDIGI

No.	SELATAN				TENGAH			UTARA				
	BENUA LAWAS	KELUA	MUARA HAPUS	PUGAAN	MURUNG PUDAK	TANJUNG	TANTA	UPAU	BINTANG ARA	HARUAI	JAPO	MUARA UYA
1	TANJUA PANTAU	TANJUAT	HAPUS	TAMUSEI	BANSEKU	KAMERTIN	DAMIKUSIP	DASUNGAKIR	MINTANG ARA	HAYUP	LANG	BIRUAI
2	BANUA LAWAS	BAHUNGIN	MANDUN	HALANGAN	KASIAU RAYA	BANYU TAUN	WARUKIN	MASINGAI I	USIH	LOK BATU	Sdan	SANTUUN
3	BUNSIN	BINTURU	MURING KARANGAN	SUNGAI RUKAM I	KASIAU	KAMERTIN RAYA	LUKBAYUR	PANGELAK	WALINR	NAWIN	GARAGATA	REBANG
4	HABAU	KARANGAN PUTIH	PADANGIN	SUNGAI RUKAM II	MABURAI	SUNGAI PIMPING	PADAMIGIN		BURUM		JAPO	
5	BANSKULING	MASINTAN	TANTAPINGIN	JIRAK	KAPAR	PAMARANGAN KIWA	PUABN KAMAN					
6	HABAU HULU	PUDAK BETEGAL	MADANG	PUBAAN		KITANG	PULAU KUU					
7	HAPALAH		MANTUL				WALANSKIR					
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
	6	5	6	5	4	5	5	2	3	2	2	2

Update	23/03/2025
Time	4.59 PM
TAHAP I	10
TAHAP II	47
Tahap III	0
Target 2025	61

c. Koordinasi strategis dan teknis terkait pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi Dan Digital RI telah dilakukan guna mendukung percepatan transformasi digital dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah. Adapun Virtual machine yang telah dikelola yaitu sebanyak 44 VM.

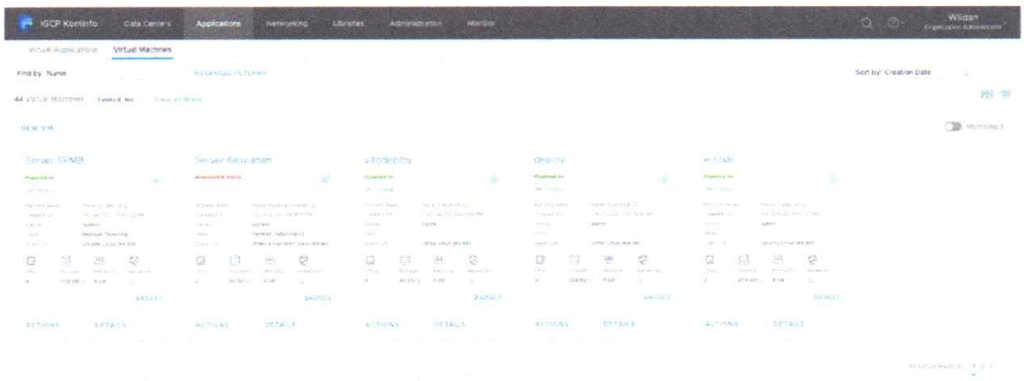

Selain pemanfaatan PDN, dalam rangka menjaga kemandirian infrastruktur digital daerah dan mengakomodasi sistem yang memerlukan akses lokal cepat, Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi juga mengelola server secara aktif melalui Serverfarm Diskominfo. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data cadangan (backup), lingkungan

pengembangan aplikasi (development environment), serta hos bagi aplikasi yang belum bermigrasi ke pusat data nasional. Adapun server yang dikelola secara aktif saat ini berjumlah sebanyak 18 Server Fisik dan 2 Server Virtual Machine.

d. Berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/66/PD.02/2025 Hal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE, Kabupaten Tabalong tidak masuk dalam Lokus Taubin (Pemantauan dan Pembinaan) SPBE Tahun 2025, sehingga nilai atau indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menggunakan perolehan nilai akhir indeks SPBE pada Tahun 2024 yaitu 3,70 dengan predikat Sangat Baik.

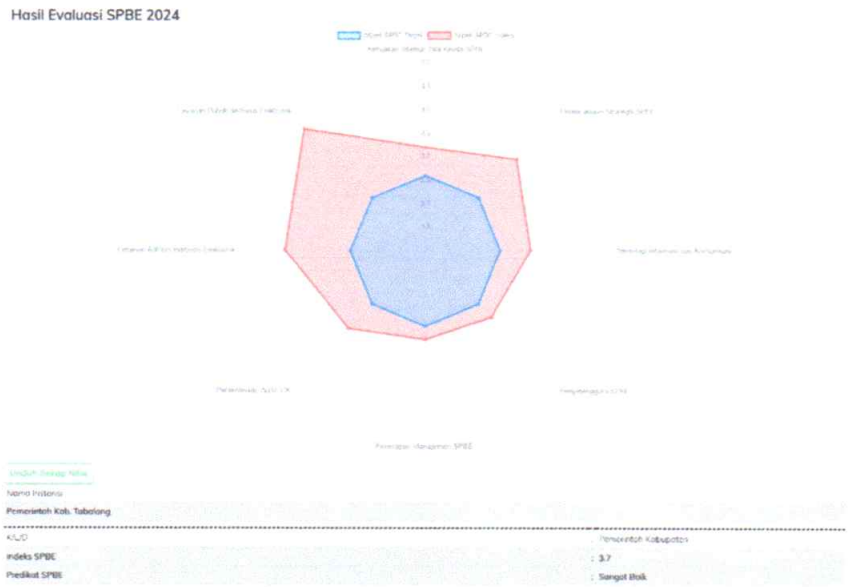

Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024

Dalam rangka persiapan menuju Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melakukan review terhadap Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE untuk Tahun 2025-2029.

Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE 2025-2029

Hasil dari reviu dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berbasis elektronik. Dengan adanya dokumen Arsitektur dan Peta Rencana yang telah diperbarui, Diskominfo dapat melakukan pengawasan (monitoring) yang lebih efektif terhadap setiap usulan kegiatan TIK dari SKPD, menjamin efisiensi sumber daya, serta meningkatkan nilai kematangan Indeks SPBE Kabupaten secara berkelanjutan.

e. Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi telah berhasil memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Pemanfaatan platform SPLP ini merupakan langkah strategis daerah untuk menciptakan integrasi data yang aman, efisien, dan terstandarisasi secara nasional. Melalui sistem ini, Diskominfo memfasilitasi pertukaran data (*data sharing*) antar-instansi baik di tingkat pusat maupun daerah tanpa harus membangun infrastruktur penghubung baru. Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi birokrasi, di mana data tidak lagi tersimpan secara terisolasi di masing-masing perangkat daerah, melainkan dapat saling terhubung melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang terstandarisasi. Sepanjang Tahun 2025, SPLP yang telah diimplementasikan berhasil difungsikan secara optimal untuk berbagi pakai data antar-sektoral dan mengintegrasikan sebanyak 11 API . Dengan adanya mekanisme berbagi pakai ini, setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat mengakses dan memanfaatkan data dari instansi lain secara sah dan aman untuk mendukung fungsi layanan masing-masing. Hal ini

menghilangkan ego sektoral dan praktik pengumpulan data yang berulang-ulang untuk objek yang sama. Capaian ini mencakup sinkronisasi data lintas sektoral yang memungkinkan berbagai aplikasi layanan publik di Kabupaten Tabalong untuk melakukan validasi data secara otomatis dan real-time. Dengan tersambungnya aplikasi daerah ke gerbang SPLP nasional, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah berhasil memangkas prosedur birokrasi yang sebelumnya bersifat manual.

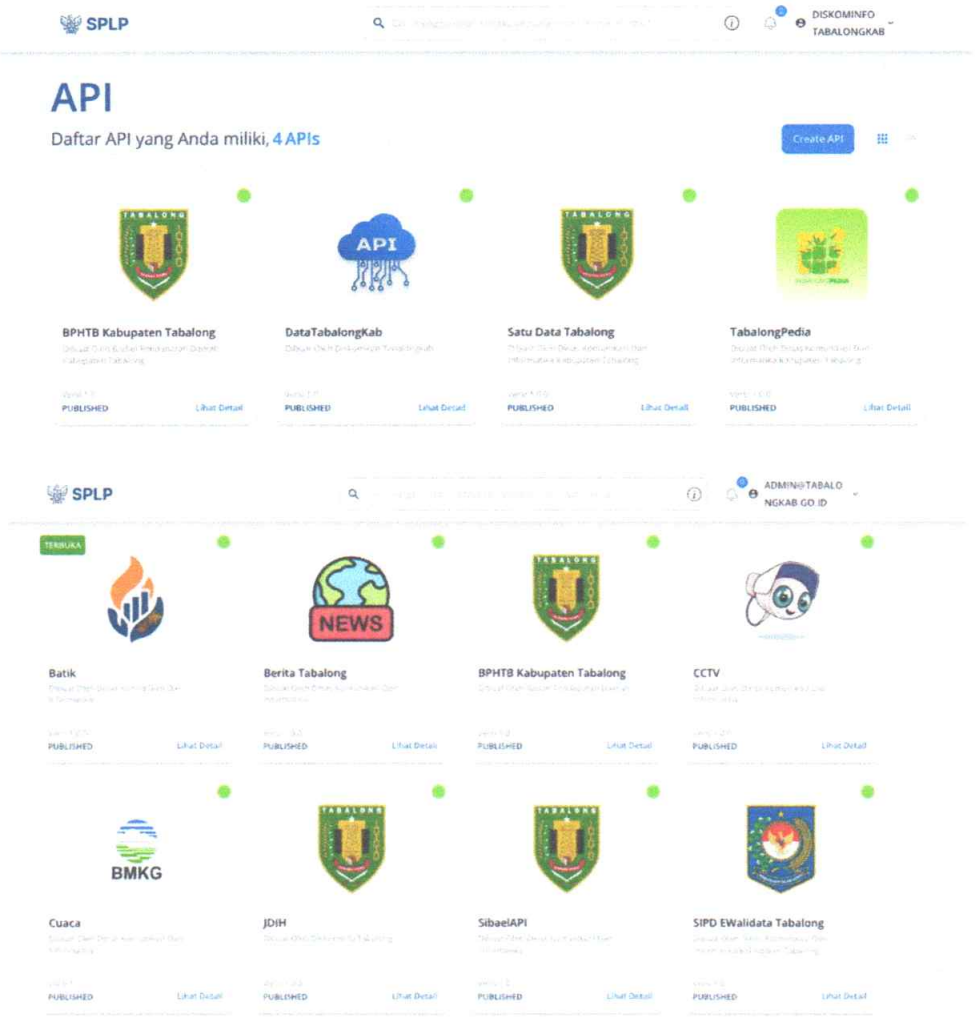

f. Pembuatan dan Pembangunan Aplikasi pada Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi didasari oleh kebutuhan untuk melakukan transformasi digital terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Berikut tujuan utama dari pengembangan suatu sistem:

1. Mendigitalisasi alur kerja agar lebih akuntabel dan terpantau;

2. Mempercepat waktu pemrosesan data serta jumlah hari pelayanan semakin cepat;
3. Tersedianya dasbor analitik untuk pimpinan sebagai dasar pengambilan Keputusan yang berbasis data

Hingga saat ini, Pembangunan aplikasi telah mencapai persentase 100% dengan beberapa aplikasi unggulan di antaranya berikut:

1. Aplikasi e-Office

   merupakan sebuah sistem informasi yang mempunyai fungsi untuk melakukan presensi masuk dan pulang kerja, penginputan aktivitas kinerja harian pegawai ASN, instrumen verifikasi kedisiplinan kehadiran Pegawai ASN oleh atasan langsung, instrument verifikasi aktivitas kinerja Pegawai ASN oleh atasan langsung, dan laporan tambahan penghasilan pegawai ASN
2. Simpeg

   merupakan Sistem informasi Manajemen Kepegawaian Kabupaten Tabalong yang dikembangkan dan dikelola oleh BKPSDM Kabupaten Tabalong yang fungsinya mengolah data seluruh ASN Kabupaten Tabalong serta sistem ini juga memuat layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, gaji berkala, usul ujian dinas, usul PLT/PLH dan sebagainya. Sehingga aplikasi e-Office cukup mengambil database dari aplikasi Simpeg ini.
3. Tabalong Pedia

   adalah aplikasi resmi Pemerintah Kabupaten Tabalong yang berfungsi sebagai gerbang informasi terpadu untuk memudahkan masyarakat dan pengunjung mengakses data lengkap tentang Kabupaten Tabalong, mencakup informasi wisata, budaya, pemerintahan, ekonomi, berita terkini, layanan publik, UMKM, hingga potensi daerah, dalam satu platform tunggal untuk mempromosikan dan mendukung pembangunan daerah.
4. Batik

   merupakan Basis Data Statistik Sektoral yang pengelolaannya berada dibawah bidang Statistik dan Persandian yang memuat layanan data statistik, chart skpd, publikasi, serta profil statistik sektoral Kabupaten Tabalong.

g. Pada Tahun 2025 juga ada beberapa aplikasi baru yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong yaitu :

1. Homecare
2. Tabalong Siaga
3. Tabalong Smart Command Center
4. ACIL Smart AI Tabalong
5. Smart Desa
6. Pendamping Pasien
7. Buku Tamu
8. Undian Paliat
9. Siujitepat (Pengembangan)
10. E-Sinar (Pengembangan)
11. Mesin Antrian MPP (online)
12. E-Office Desa
13. RTH Monitoring

Sampai saat ini aplikasi yang digunakan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong baik itu terdiri dari Aplikasi Pusat serta Aplikasi Khusus adalah sebagai berikut:

1. Layanan Pemerintahan terdapat 40 (Empat Puluh) domain aplikasi;
2. Layanan Publik terdapat 31 (Tiga Puluh Satu) domain aplikasi;
3. Layanan Terintegrasi terdapat 5 (Lima) Aplikasi khusus.

(Sumber data : https://tss.tabalongkab.go.id/)

Secara keseluruhan, pembangunan aplikasi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Hasil uji coba menunjukkan peningkatan kepuasan pengguna dalam kemudahan akses informasi, serta pemantauan kinerja server secara berkala untuk menjamin stabilitas layanan pada saat beban puncak.

h. Telah melaksanakan pembuatan dokumen Master Plan *Command Center* Kabupaten Tabalong dan pengadaan perangkat pendukung untuk Pembangunan *Command Center* Kabupaten Tabalong. Pembangunan Infrastruktur Pusat Kendali (*Command Center*) Kabupaten Tabalong merupakan Transformasi Pengawasan dan Pengambilan Keputusan Sebagai pusat integrasi data dan pusat pemantauan aktivitas daerah.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi *Smart City* melalui penyediaan fasilitas yang mampu menyajikan data secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan daerah.

Master plan *Command Center* adalah dokumen rancangan atau cetak biru yang menjelaskan secara komprehensif visi, tujuan, infrastruktur, dan strategi untuk membangun sebuah pusat kendali (*Command Center*) yang terintegrasi.

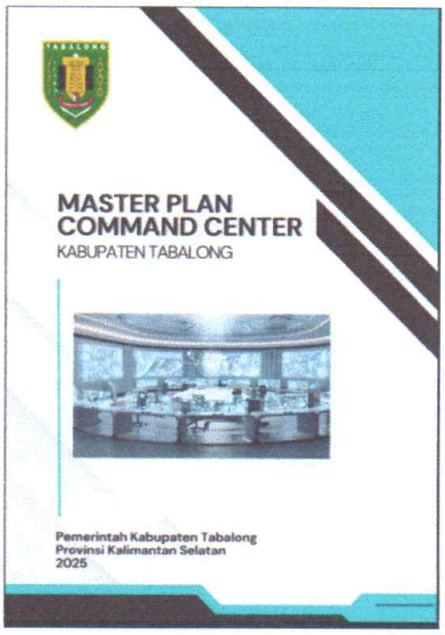

Dokumen ini memuat gambaran besar mengenai tata letak, fasilitas, teknologi yang dibutuhkan, hingga sumber daya manusia yang akan

menjalankan operasionalnya, dengan tujuan utama untuk memantau, mengelola, dan mengendalikan suatu kegiatan atau layanan secara efektif. Penyusunan Dokumen Master Plan *Command Center* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong ini adalah untuk memenuhi kebutuhan monitoring dan respon cepat terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tabalong melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah saling terintegrasi dengan beberapa fitur atas fasilitas *Smart City* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.

i. Dalam rangka kepatuhan terhadap standar nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika telah berkolaborasi secara intensif dengan Auditor Inspektorat Kabupaten Tabalong. Sinergi lintas instansi ini diwujudkan melalui pelaksanaan Audit SPBE Tahun 2025, yang bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap aset digital strategis milik pemerintah daerah. Lingkup dan Objek Pemeriksaan Proses audit dilaksanakan secara profesional dan sistematis, mencakup dua pilar utama infrastruktur digital daerah, yaitu:

   1. Audit Infrastruktur SPBE: Dilakukan terhadap objek audit Jaringan Intra Pemerintah.
   2. Audit Aplikasi SPBE: Dilakukan terhadap objek audit Aplikasi TabalongPedia sebagai salah satu platform unggulan daerah.

Dampak dan Tindak Lanjut Hasil dari proses audit bersama Inspektorat ini memberikan dasar yang kuat bagi Diskominfo dalam melakukan perbaikan dan

penguatan sistem secara berkelanjutan. Langkah audit ini memastikan bahwa infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik di Kabupaten Tabalong tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga telah memenuhi standar kepatuhan hukum dan keamanan informasi yang berlaku secara nasional. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Capaian makro Program Aplikasi Informatika yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kota Cerdas Sub Kegiatan Pengembangan Kota Cerdas (Kabupaten Kota) adalah sebagai berikut :

a. Pada tahun 2025 kementerian komdigi tidak melaksanakan penilaian Smartcity di seluruh kabupaten/kota jadi indeks smarticity kabupaten Tabalong masih berada di nilai indek 3,55.
b. Salah satu capaian penting adalah terealisasinya pembangunan menara BTS di enam wilayah prioritas dengan sinyal lemah, yaitu:
   1. Desa Burum, Kecamatan Bintang Ara
   2. Desa Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya
   3. Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya
   4. Desa Uwie, Kecamatan Muara Uya
   5. Desa Bangkiling, Kecamatan Banua Lawas
   6. Desa Kasiau Raya, Kecamatan Murung Pudak
   7. Desa Masingai, Kecamatan Upau
c. Penambahan internet gratis sebanyak 61 titik lokasi tersebar di 12 kecamatan kabupaten Tabalong.

No	Lokasi
1	Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas
2	Desa Banua Lawas Kecamatan Banua Lawas
3	Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas
4	Desa Habau Kecamatan Banua Lawas
5	Desa Bangkiling Kecamatan Banua Lawas
6	Desa Habau Hulu Kecamatan Banua Lawas
7	Desa Hapalah Kecamatan Banua Lawas

8	Desa Takulat Kecamatan Kelua
9	Desa Bahungin Kecamatan Kelua
10	Desa Binturu Kecamatan Kelua
11	Desa Karangan Putih Kecamatan Kelua
12	Desa Masitan Kecamatan Kelua
13	Desa Pudak Setegal Kecamatan Kelua
14	Desa Harus Kecamatan Muara Harus
15	Desa Manduin Kecamatan Muara Harus
16	Desa Murung Karangan Kecamatan Muara Harus
17	Desa Padangin Kecamatan Muara Harus
18	Desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus
19	Desa Madang Kecamatan Muara Harus
20	Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus
21	Desa Tamunti Kecamatan Pugaan
22	Desa Halangan Kecamatan Pugaan
23	Desa Sungai Rukam I Kecamatan Pugaan
24	Desa Sungai Rukam II Kecamatan Pugaan
25	Desa Jirak Kecamatan Pugaan
26	Desa Pugaan Kecamatan Pugaan
27	Desa Masukau Kecamatan Murung Pudak
28	Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak
29	Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak
30	Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak
31	Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak
32	Desa Kambitin Kecamatan Tanjung
33	Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung
34	Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung

35	Desa Sungai Pimping Kecamatan Tanjung
36	Desa Pamaratan Kiwa Kecamatan Tanjung
37	Desa Kitang Kecamatan Tanjung
38	Desa Mangkusip Kecamatan Tanta
39	Desa Warukin Kecamatan Tanta
40	Desa Lukbayur Kecamatan Tanta
41	Desa Padangin Kecamatan Tanta
42	Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta
43	Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta
44	Desa Walangkir Kecamatan Tanta
45	Desa Masingai II Kecamatan Upau
46	Desa Masingai I Kecamatan Upau
47	Desa Pangelak Kecamatan Upau
48	Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara
49	Desa Usih Kecamatan Bintang Ara
50	Desa Waling Kecamatan Bintang Ara
51	Desa Burum Kecamatan Bintang Ara
52	Desa Hayup Kecamatan Haruai
53	Desa Lok Batu Kecamatan Haruai
54	Desa Nawin Kecamatan Haruai
55	Desa Lano Kecamatan Jaro
56	Desa Solan Kecamatan Jaro
57	Desa Garagata Kecamatan Jaro
58	Desa Jaro Kecamatan Jaro
59	Desa Binjai Kecamatan Muara Uya
60	Desa Santuun Kecamatan Muara Uya
61	Desa Ribang Kecamatan Muara Uya

d. Penambahan CCTV berjumlah 24 titik lokasi di tahun 2025 di RTH, Ruang Publik, Area Pendidikan dan Fasilitas Umum

No	Nama Tempat	Keterangan
1	RTH Bougenvile	Ruang Terbuka Hijau
2	RTH Taman Kambang Tanjung Selatan	Ruang Terbuka Hijau
3	RTH Taman Hikun Agri Park	Ruang Terbuka Hijau
4	Tanjung Expo Center	Ruang Terbuka Hijau
5	RTH Tanjung Selatan 8	Ruang Terbuka Hijau
6	RTH Linda Regency 5	Ruang Terbuka Hijau
7	RTH Taman Jaro	Ruang Terbuka Hijau
8	RTH Taman Haruai	Ruang Terbuka Hijau
9	RTH Tanta	Ruang Terbuka Hijau
10	RTH Taman Giat Tanjung	Ruang Terbuka Hijau
11	RTH Taman Muara Uya	Ruang Terbuka Hijau
12	Terminal Kelua	Fasilitas Umum
13	Dusun Sulangai Desa Solan	Fasilitas Umum
14	Lapangan Pendopo	Ruang Publik
15	Stadion Sport Center	Ruang Publik
16	Barunak Tanjung	Ruang Publik
17	Plaza Umaiyah	Ruang Publik
18	BBI Kambitin	Ruang Publik
19	Halaman Kantor Kecamatan Bintang Ara	Ruang Publik
20	Halaman Kantor Kecamatan Pugaan	Ruang Publik
21	Halaman Kantor Kecamatan Banua Lawas	Ruang Publik
22	Halaman Kantor Kecamatan Muara Harus	Ruang Publik
23	Darun Nafis	Ruang Publik
24	Mesjid Pusaka Banua Lawas	Ruang Publik

Menara Telekomunikasi bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Badan Aksibelitas Telekomunikasi dan Informasi) di tujuh Lokasi Daerah Terpencil di Kabupaten Tabalong Desa Kumap Kecamatan Muara Uya, Desa Purui Kecamatan Jaro, Desa Salikung Kecamatan Muara Uya, Desa Binjai Kecamatan Muara Uya, Desa Panaan Kecamatan Bintang Ara, Desa Dambung Kecamatan

Muara Uya.

Kualitas jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Tabalong yaitu 2G = 2 %, 3G/4G= 98% dengan data menara sebagai berikut :

e. Data menara telekomunikasi bakti kemkominfo ri kabupaten tabalongtahun 2025

NO.	LOKASI	ALAMAT	LATITUDE	LONG	TINGGI	KET
1	BTS Kumap	Ds. Kumap RT.01 Kec.Muara Uya	1°45'37.61" S	115°30'41.69 " E	32 Meter	Aktif
2	BTS Purui	Ds. Purui RT.01 Kec.Jaro	1°53'0.22" S	115°41'1.73" E	32 Meter	Aktif
3	BTS Salikung	Ds. Salikubng RT.01 Kec.Muara Uya	1°46'35.97" S	115°31'54.02 " E	32 Meter	Aktif
4	BTS Binjai	Ds. Binjai RT.02 Kec.Muara Uya	1°52'8.48" S	115°31'53.96 " E	32 Meter	Aktif
5	BTS Panaan	Ds.Panaan RT.01 kec.Bintang Ara	1°51'48.49" S	115°21'34.36 " E	32 Meter	Aktif
6	BTS Hegarmanah	Ds. Hegarmanah RT.02 kec. Bintang ara	1°44'41.23" S	115°21'46.80 " E	32 Meter	Aktif
7	BTS Dambung	Ds. Dambung RT.01 Kec. Bintang Ara	1°40'6.14" S	115°23'47.93 " E	32 Meter	Aktif

f. Data sekolah dikabupaten tabalong yang telah difasilitasi bakti 2025

No	Lokasi	Keterangan
1	SDN 3 Kembang Kuning Kec.Haruai	Aktif
2	MTSN 11 Tabalong Kec. Tanjung	Aktif
3	MTSN 12 Tabalog Kec. Muara Harus	Aktif
4	MAN 3 Tabalong Kec. Pugaan	Aktif
5	MTSN 2 Tabalong Kec. Kelua	Aktif
6	MTSN 7 Tabalong Kec. Tanjung	Aktif
7	MTSN 6 Tabalong Kec. Jaro	Aktif
8	Rest Area Raudah Kec. Jaro	Aktif

g. Menara Telekomunikasi milik Provider Swasta yang tersebar di desa-desa Kabupaten Tabalong sebanyak 144 Menara Telekomunikasi

DATA PEMILIK TOWER TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA PEMILIK	Jumlah Menara				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	PT. TELKOMSEL	8	-	-	-	-
2	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	6	-	-	-	-
3	PT. XL AXIATA,Tbk	3	-	-	-	-
4	PT. PROTELINDO	40	-	-	-	-
5	PT. TOWER BERSAMA GROUP	6	-	-	-	-
6	PT. INDOSAT, Tbk	-	-	-	-	-
7	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	52	-	-	-	-
8	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA	5	-	-	-	-
9	PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA	15	-	-	-	-
10	PT. KHARISMA DAYA INDO	-	-	-	-	-
11	PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA	1	-	-	-	-
12	BAKTI (KEMKOMINFO)	7	-	-	-	-
13	PT. BUMA	1	-	-	-	-
14	PT. EPID MENARA ASSETCO	6	-	-	-	-
15	BERKAT MANDIRI UTAMA TANJUNG	1	-	-	-	-
16	HADIANOR	1	-	-	-	-
17	HAYKAL SOLUTIONS TECHNOLOGY	1	-	-	-	-
18	AIIRA MEDIA SOLUTION	4	-	-	-	-
19	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	2	-	-	-	-
20	ADARO INDONESIA	1	-	-	-	-
21	APRILIA TRI MAHARDIKA	2	-	-	-	-
TOTAL		162	-	-	-	-

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja eselon II sampai dengan eselon IV pada anggaran Tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Program	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	12.479.831.280,-	11.986.533.640,-
	1. Kegiatan	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	164.577.000,-	92.997.000,-
	a. Sub.Keg	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	141.465.000,-	75.889.000,-
	b. Sub.Keg	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.	23.112.000,-	17.108.000,-
	2. Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	8.425.651.000,-	8.425.651.000,-
	a Sub.Keg	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	8.425.651.000,-	8.425.651.000,-
	3. Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	468.934.120,-	350.754.120,-
	a Sub.Keg	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	40.709.120,-	40.709.120,-
	b Sub.Keg	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	428.225.000,-	310.045.000,-
	4. Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	661.759.130,-	475.193.790,-
	a Sub.Keg	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.433.939,-	20.794.104,-
	b Sub.Keg	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	158.546.120,-	121.849.615,-
	c Sub.Keg	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	19.767.893,-	19.767.893,-
	d Sub.Keg	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	10.800.000,-	10.800.000,-
	e Sub.Keg	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	437.211.178,-	301.982.178,-
	5. Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	440.450.720,-	326.478.420,-
	a Sub.Keg	Pengadaan Mebel.	6.347.190,-	6.347.190,-
	b Sub.Keg	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	364.119.836,-	250.147.536,-

	c Sub.Keg	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	69.983.694,-	69.983.694,-
	6. Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	1.520.190.880,-	1.517.190.880,-
	a Sub.Keg	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	443.400.000,-	443.400.000,-
	b Sub.Keg	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	1.076.790.880,-	1.073.790.880,-
	7. Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	798.268.430,-	798.268.430,-
	a Sub.Keg	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	461.860.000,-	461.860.000,-
	b Sub.Keg	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	277.908.430,-	277.908.430,-
	c Sub.Keg	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	58.500.000,-	58.500.000,-
2	Program	Informasi Dan Komunikasi Publik.	7.172.082.496,-	8.722.082.496,-
	8. Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	7.172.082.496,-	8.722.082.496,-
	a Sub.Keg	Relasi Media.	3.608.360.000,-	4.708.360.000,-
	b Sub.Keg	Pelayanan Informasi Publik.	149.997.796,-	374.997.796,-
	c Sub.Keg	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik.	60.359.700,-	60.359.700,-
	d Sub.Keg	Pengelolaan Media Komunikasi Publik.	3.353.365.000,-	3.578.365.000,-
3	Program	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	5.398.312.070,-	11.359.854.570,-
	9. Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	36.034.000,-	28.607.000,-
	a. Sub.Keg	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.	36.034.000,-	---
	a. Sub.Keg	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	---	28.607.000

	10. kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	5.362.278.070,-	11.331.247.570,-
	a. Sub.Keg	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional.	170.136.138,-	170.136.138,-
	b. Sub.Keg	Koordinasi penyusunan proses bisnis.	12.280.000,-	12.280.000,-
	c. Sub.Keg	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda.	16.360.000,-	16.360.000,-
	d. Sub.Keg	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	2.040.000,-	2.040.000,-
	e. Sub.Keg	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	380.722.924,-	352.755.424,-
	f. Sub.Keg	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	35.347.000,-	23.813.500,-
	g. Sub.Keg	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	115.407.000,-	102.743.500,-
	h. Sub.Keg	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah.	24.059.000,-	13.049.500,-
	i. Sub.Keg	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	1.295.906.000,-	4.639.451.295,-
	j. Sub.Keg	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.105.365.008,-	5.840.647.724,-
	k. Sub.Keg	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	92.070.000,-	70.902.989,-
	l. Sub.Keg	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	103.345.000,-	77.827.500,-
	m. Sub.Keg	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	9.240.000,-	9.240.000,-
4	Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	627.557.420,-	564.247.920,-

	10. kegiatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	627.557.420,-	564.247.920,-
	a. Sub.Keg	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	195.933.040,-	157.905.040,-
	b Sub.Keg	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional.	173.562.400,-	188.512.400,-
	c. Sub.Keg	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral.	89.198.000,-	56.335.000,-
	d. Sub.Keg	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.	137.061.980,-	134.999.480,-
	e. Sub.Keg	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar.	31.802.000,-	26.496.000,-
5	Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	524.649.400,-	366.643.400,-
	11. kegiatan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	458.458.400,-	312.789.400,-
	a. Sub.Keg	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	115.676.200,-	70.052.200,-
	b. Sub.Keg	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	161.984.200,-	144.061.700,-
	c. Sub.Keg	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	104.054.000,-	52.338.000,-
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	76.744.000,-	46.337.500,-
	12. Kegiatan	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	66.191.000,-	53.854.000,-
	a. Sub.Keg	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66.191.000,-	53.854.000,-
Total			26.202.432.666,-	32.999.362.026,-

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2025	
			Target	Realisasi
2.10	Komunikasi dan Informatika			
2.10.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100
2.10.2	Terlaksananya E-Government	Persen	100	100
2. 14	Statistik			
2.14.1	Persentase penyelenggaraan Statistik sektoral lingkup Kabupaten	Persen	100	100
2.15	Persandian			
2.14.2	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	100	100

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TABALONG
ESELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) (Nilai)	60
2	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	4
3	Meningkatnya keamanan Informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Nilai)	380
4	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan statistik sektoral di daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,95
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB

No	PROGRAM	ANGGARAN INDUK (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.479.831.280,-	11.986.533.640,-	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.172.082.496,-	8.722.082.496,-	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.398.312.070,-	11.359.854.570,-	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	627.557.420,-	564.247.920,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	524.649.400,-	366.643.400,-	APBD
	JUMLAH	26.202.432.666,-	32.999.362.026,-	APBD

DAFTAR PENGHARGAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Penghargaan	SKPD Pengampu	Pemberi Penghargaan	Tahun Perolehan	Predikat/Kategori
1	LPPL TV Terbaik se-Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Asosiasi LPPL TV Radio Seluruh Indonesia	2025	Ajang Penghargaan dari Asosiasi LPPL TV Radio Seluruh Indonesia untuk LPPL TV Terbaik se-Indonesia.
2	Juara 1 Kategori Kultum Ramadhan Radio	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anugerah Syiar Ramadhan KPID Kalsel	2025	Ajang Penghargaan dari KPID Kalsel untuk kategori Kultum Ramadhan.
3	Juara 1 Kategori Liputan Ramadhan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anugerah Syiar Ramadhan KPID Kalsel	2025	Ajang Penghargaan dari KPID Kalsel untuk kategori Liputan Ramadhan.
4	Juara 1 Kategori Liputan Wisata Budaya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anugerah Syiar Ramadhan KPID Kalsel	2025	Ajang Penghargaan dari KPID Kalsel untuk kategori Liputan Wisata Budaya.
5	Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	KPID Kalsel	2025	Ajang Penghargaan dari KPID Kalsel untuk Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran.
6	Nominasi Radio Terinovatif	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Ajang Indonesia Persada.ID Award	2025	Ajang Penghargaan dari Persada.ID untuk Nominasi Radio Terinovatif.

7	Nominee LPPL TV Terbaik se Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anugerah KPI Pusat	2025	Ajang Penghargaan dari KPI untuk Nominee LPPL TV Terbaik se Indonesia.

BAB V
PENUTUP

Laporan kegiatan tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun sebagai bahan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tabalong untuk Bupati yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memuat laporan hasil evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan *(progres report)* yang disusun sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tabalong dalam rangka mendorong suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dan terwujudnya *Good Governance*, E- Government melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta peningkatan layanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat.

Laporan ini didalamnya memuat hasil – hasil tingkat capaian kinerja yang diukur berdasarkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi selanjutnya.

Tanjung, 12 Januari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong,

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

EDDY SURIYANI, S.Sos., MA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197412231994031004